



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 04, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711

Telp/Fax. (0511) 772924

LAPORAN

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN POKOK-POKOK PIKIRAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2024

A. Pendahuluan.

1. Umum/ latar belakang

Menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B/ 1989/ KSP.00/70-74/04/2024 tanggal 18 April 2024 hal Sosialisasi Area dan hasil Sosialisasi Area, Indikator dan Sub Indikator MCP KPK 2024 tanggal 29 April 2024 melalui *zoom meeting* bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan Pokir yang dikerjakan oleh SKPD teknis. Bahwa sesuai hasil *zoom meeting* tersebut dinyatakan untuk kegiatan pokir tahun 2024 berdasarkan indikator penilaian MCP KPK Tahun 2024 harus memuat laporan pengawasan atas pelaksanaan pokok pikiran oleh SKPD teknis pelaksana pokok pikiran (Pokir).

Pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokok pikiran yang tidak memenuhi azas manfaat, efisiensi, efektivitas, dan program prioritas dikoordinasikan kembali oleh Tim Penelaah melalui Bapperida dengan DPRD untuk penggantian usulan pokok pikiran.

Pokok pikiran DPRD memuat:

- Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan.
- Rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang.
- Agenda kerja DPRD.

Pengawasan pada dasarnya adalah sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam

melaksanakan kegiatan. Didalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu kegiatan pengawasan APBD tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksana saja, tetapi mulai dari proses perencanaan (perumusan APBD) sampai pada hasil pemanfaatan APBD.

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. PP Nomor 16 tahun 2010 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 700.1.2.4/52/IJ dan HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang tentang Pengelolaan Bersama Monitoring Center of Prevention (MCP)
- e. Surat Tugas Nomor :....

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan yaitu:

- a. Memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan pikir.
 - b. Memberikan saran perbaikan,,,,,
- Ruang Lingkup pengawasan yaitu data pokok pikiran, realisasi keuangan dan fisik, penerima manfaat, lokasi, serta dokumentasi hasil pengawasan.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode wawancara, pengumpulan dokumen, dan cek fisik lokasi pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2024.

C. Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil pengawasan atas pelaksanaan pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Data Pokok Pikiran
(berisi data pikir)
2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan dan Fisik
(berisi data alokasi anggaran dan realisasi keuangan dan fisik pikir)
3. Penerima Manfaat Pokir
(berisi data penerima manfaat pikir)
4. Lokasi
(berisi data lokasi pikir)
5. Dokumentasi Hasil Pengawasan
(berisi Dokumentasi Hasil Pengawasan lokasi pikir, dll)
(atau dapat juga dituangkan ke berupa tabel seperti dibawah ini)

No.	Data Pokok Pikiran	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan dan Fisik	Penerima Manfaat Pokir	Lokasi	Dokumentasi Hasil Pengawasan	Keterangan
1	Rebana Maulid Habsyi	Murni	Rp.7.000.000	Kelompok Yasinan Sungai Tiung	Banjarbaru		Dilaksanakan Bulan November
2	Sound System	Murni	Rp. 5.000.000	Kelompok Yasinan Sungai Tiung	Banjarbaru		Dilaksanakan Bulan November
3	Alat Maulid Habsyi	Murni	Rp. 45.000.000	Warga Kelurahan Sungai Besar dan Kelurahan Sungai Ulin	Banjarbaru		Dilaksanakan Bulan November
4	Rebana Maulid Habsyi	Murni	Rp.7.000.000	Warga Komplek BPI RW 04 Kelurahan Sungai Ulin	Banjarbaru		Tidak Ada Proposal
5	Sound System	Murni	Rp. 5.000.000	Warga RT 20 RW 04	Banjarbaru		Tidak Ada Proposal

				Kelurahan Kemuning, Loktabat Selatan			
--	--	--	--	---	--	--	--

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengawasan atas pelaksanaan pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2024 dapat disimpulkan data pokok pikiran, realisasi keuangan dan fisik pokir, penerima manfaat pokir, dan lokasi pokir telah sesuai dengan yang direncanakan dan ketentuan yang berlaku.

E. Penutup.

Demikian Laporan Pengawasan atas pelaksanaan pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2024 ini disampaikan sebagai bahan laporan dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Banjarbaru,
pada tanggal 11 November 2024

Plh, Kepala Dinas,



MUHYAR LUTFI, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 19680408 199010 1 001